

## BAB II TINJAUAN LITERATUR

### A. PENELITIAN TERDAHULU

Sejumlah penelitian terdahulu telah dilakukan beberapa ilmuwan. Beberapa karya penelitian itu dapat kita bagi ke dalam dua kategori. *Pertama*, penelitian yang mengkaji nasionalisme dalam konteks konsolidasi kebangsaan. Yang *kedua*, penelitian yang mengangkat nasionalisme dalam kaitan dengan delegitimasi atas proyek negara-bangsa itu sendiri. Kategori pertama dapat ditilik dari karya dua indonesianis terkemuka; George Mc. Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia* (1952) dan karya Benedict R.O.G Anderson, *Java in a Time of Revolution; Occupation and Resistance, 1944-1946* (1972). Dua karya ini kini telah menjadi kitab sejarah klasik. Pendekatannya memang lebih pada kajian historis daripada sosiologis. Kedua karya itu mengilustrasikan bagaimana proses konsolidasi kebangsaan sebuah negeri yang baru memproklamkan kemerdekaannya dan harus bekerja ekstra keras mempertahankan integrasi politik dan teritorialnya dari invasi bekas penjajah lamanya. Para sejarawan menamai fase tersebut sebagai fase revolusi.

Buku Kahin menggambarkan aspek-aspek umum dari dinamika yang terjadi dalam proses revolusi kebangsaan tersebut. Dalam hal ini terkait dengan proses integrasi politik yang belumlah utuh. Tahun-tahun revolusi itu, menurut Kahin, adalah tahun-tahun pertarungan. Ia menguraikan betapa rumitnya proses integrasi itu yang ditandai dengan meruahnya perpecahan yang terjadi di dalam tubuh Republikan. Perpecahan itu berkisar pada tiga ranah; faksionalisasi elite, sentiment sipil-militer, dan polarisasi ideologis. Ranah pertama mewujud dalam konflik antara para pemimpin yang menginginkan pemerintahan presidensiil dan mereka yang menghendaki suatu sistem parlementer. Yang kedua akhirnya memenangkan 'pertarungan.' Kekuasaan presiden segera dilucuti, lembaga perdana menteri dibentuk, dan KNIP yang telah disulap sebagai parlemen menjadi sangat berkuasa. Sistem parlementer ini menghasilkan pemerintahan yang rapuh. Ranah kedua adalah sentimen sipil-militer. Hal ini ditandai oleh munculnya pertentangan di kalangan elite sipil dan militer terkait bagaimana menyelesaikan

ketegangan antara Indonesia dan Belanda. Para pemimpin sipil memilih jalur diplomasi, sementara para elite militer di bawah Jenderal Soedirman memilih perjuangan fisik lewat perang gerilya. Sementara ranah ketiga adalah polarisasi ideologi. Ranah ini adalah batu penghalang paling besar dan kerikil paling tajam yang merintang konsolidasi kebangsaan Indonesia. Polarisasi ini ditandai dengan munculnya beragam partai dengan latar ideologi yang berbeda, ketidakpuasan faksi Islam atas Konstitusi yang tidak mengakomodasi rumusan mereka hingga berujung pada pemberontakan DII/TII, dan ketidaksabaran faksi komunis dalam proses politik yang terjadi sehingga berujung pada pemberontakan di Madiun 1948.

Sementara itu, buku Anderson menyoroti fenomena yang sama dari proses integrasi kebangsaan di Indonesia. Namun, buku itu secara lebih spesifik menitikberatkan pada aktivitas kelompok-kelompok pemuda dalam revolusi. Perbedaan lain, rentang waktu riset Anderson dimulai sejak era Jepang. Ia menguraikan peran para pemuda di Jawa dalam mengorganisir gerakan di bawah tanah menentang kuasa Jepang. Pemuda-pemuda ini masih aktif saat revolusi yang mengiringi proklamasi berlangsung. Sejumlah karya sejenis sebenarnya juga dibuat. Dalam hal ini seperti buku Anthony Reid, *the Blood of the People: Revolution and the End of Traditional Rule in Northern Sumatera*. Buku ini menguraikan bagaimana revolusi integrasi nasional menjadi semacam 'legitimasi' bagi pelucutan kuasa para bangsawan tradisional oleh rakyat di sejumlah daerah di Sumatera Utara.

Ketiga karya penelitian ini telah menjadi media pencerahan bagi penjelasan tentang nasionalisme Indonesia pasca kemerdekaan. Suatu kajian yang dipandu oleh angan-angan tentang integrasi nasional Indonesia dan bagaimana bangsa ini memperjuangkannya. Penelitian ini nampaknya memang cukup relevan menjelaskan proses "menjadi Indonesia" di tahun-tahun formatifnya sebagai sebuah negara-bangsa. Namun, menjelaskan proses "menjadi Indonesia" di masa kini, tidak bisa dilakukan dengan pendekatan revolusi integratif. Imaji tentang Indonesia tentu telah berkembang. Penelitian tesis ini akan mencoba melakukan penelusuran untuk menjawabnya.

Menyangkut kategori kedua, sejumlah karya riset telah dilakukan oleh beberapa kalangan. Yang terpenting di antaranya adalah artikel Benedict Anderson (1990) berjudul “*Old State New Societies: the Indonesia New Order in Comparative Historical Perspective.*”<sup>1</sup> Dalam artikel ini Anderson mulai mengambil perspektif baru tentang sejarah nasionalisme Indonesia. Anderson menilai perlunya memisahkan antara negara dan bangsa. Sejak masa kemerdekaan, Indonesia tidak pernah mempunyai negara yang kuat hingga datangnya orde baru. Sepanjang orde lama, “negara” selalu lemah dan dikalahkan oleh “bangsa.” Negara tidak pernah mampu membangun suatu “negara-bangsa” yang kokoh. Negara orde baru membalik soalnya. Ia tampil menjadi negara paling kuat sepanjang sejarah Indonesia. Suatu kekuatan yang, menurut Anderson, hanya bisa ditandingi oleh negara kolonial pendahulunya. Dengan kekuatan represifnya, negara pada akhirnya bisa “mengalahkan” bangsa dan masyarakat.

Penelitian lain dilakukan oleh David Brown (1996), “*Neopatrimonialism and National Integration in Indonesia.*” Brown melukiskan bagaimana proses integrasi nasional yang dilakukan lewat model neopatrimonialis justru menciptakan paradoks. Yang lahir justru proses disintegrasi. Dalam sistem tradisional, elite patrimonial merupakan suatu kelas istimewa yang, karena status sosial mereka, menguasai sumber daya politik dan ekonomi. Mereka membatasi akses massa pada kekuasaan dan kekayaan. Patrimonialisme menganut hukum pertukaran. Tapi, pertukaran yang terjadi antara patron dan klien umumnya bersifat idealis. Kewajiban klien untuk memberikan loyalitas dan penghormatan kepada patron akan dibalas dengan jaminan perlindungan dan rasa aman.

Seiring dengan runtuhnya sistem tradisional, patrimonialisme nampaknya tetap dirawat. Tapi, menurut kajian Brown, pola pertukarannya diubah. Jaminan pemimpin akan perlindungan dan rasa aman harus dilengkapi dengan jaminan sumber daya material. Sebaliknya, jaminan loyalitas dari para pengikut harus dilengkapi dengan mobilisasi dukungan politik secara aktif. Inilah yang terjadi sepanjang orde lama hingga orde baru. Di masa orde lama, tulis Brown,

---

<sup>1</sup> Artikel tersebut telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi “Negara Lama, Masyarakat Baru: Orde Baru Indonesia dalam Perbandingan Perspektif Kesejarahan” dan menjadi bagian dari buku Anderson, *Kuasa Kata, Jelajah Budaya-Budaya Politik Indonesia*, Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000. Hal. 203-260

neopatrimonialisme menyebar seiring persebaran elite. Sentral-sentral neopatrimonial ini bersaing dan memobilisasi massa masing-masing untuk memperjuangkan kepentingan elite. Sementara di masa orde baru, neopatrimonialisme tersentralisir pada satu figur, Soeharto. Sang Presiden menggalang berbagai elemen kekuasaan mulai birokrasi, militer, hingga partai politik tunduk di bawah kuasanya.

Akibatnya, di masa orde lama, konflik-konflik nasionalis berkembang di seputar pertentangan faksi-faksi dalam tubuh elite baik sipil maupun militer. Sejumlah ketidakpuasan di kalangan elite militer menghasilkan separatisme di berbagai daerah. Sementara itu, di masa orde baru, sentralisme kekuasaan menghasilkan berbagai ketidakpuasan di berbagai daerah. Sentimen etnisitas menguat dengan Jawa, muasal etnis sang Presiden, sebagai 'musuh bersama.' Brown mencatat, sentimen anti-Jawa ini kian menguat terutama di daerah-daerah 'panas' seperti Aceh dan Papua Barat. Setelah kejatuhan Soeharto, suara-suara elite lama yang terbungkam oleh sentralisasi patron mulai bermunculan kembali dan mengorganisir lagi massa mereka. Faksionalisasi terjadi dalam berbagai garis batas; ideologi, etnisitas, hingga kelas.

Buku lain yang perlu diungkap adalah karya Jacques Bertrand (2004), *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*. Buku ini menelusuri konflik-konflik etnonasionalis yang berkembang sejak awal orde baru hingga awal periode reformasi. Dalam catatan Jacques Bertrand, model kebangsaan Indonesia didasarkan pada konsep sebuah bangsa Indonesia yang tunggal. Dibentuk oleh beragam manusia yang tersebar di penjuru Nusantara, sejak awalnya ia hanya sebuah visi untuk membentuk suatu pemerintahan (*polity*) yang akan menyatukan kelompok-kelompok etnis, luas wilayah, hubungan dengan dunia modern, dan pengalaman dengan penguasa kolonial yang berbeda. Setelah kemerdekaan, pertarungan di kalangan elit politik menunjukkan ketaksepakatan atas karakternya dan cara terbaik untuk menjamin kesatuannya. Mereka memasukkan isu seperti dasar negara sekular atau religius, dan tingkat representasi etnis. Ketika suatu kompromi dicapai, perubahan institusional yang mengiringinya sangat dibatasi oleh konsep asal; kesatuan.<sup>2</sup> Akibatnya, negara-bangsa yang keropos dari dalam

---

<sup>2</sup> Jacques Bertrand, *Nationalism and Ethnic Conflict in Indonesia*, 2004. hal 28

itu makin rapuh seiring dengan kolapsnya kekuatan otoriter negara yang menunjangnya. Konflik-konflik etnis meletup begitu massif pasca Orde Baru. Gerakan separatisme pun bertumbuh subur.

Dalam buku itu, Bertrand menguraikan ruang-ruang yang menjadi sengketa integrasi nasional. Ia menguraikan berbagai praktik eksklusif, diskriminasi, dan marginalisasi yang berujung pada konflik sosial maha hebat. Ruang-ruang sengketa itu meliputi wilayah etnis-sukubangsa, agama, kelas, dan sumberdaya. Bertrand menguraikan konflik-konflik etnis yang terjadi di Kalimantan, konflik yang melibatkan sentimen anti-China di sejumlah tempat di Indonesia, konflik antar-agama di Maluku dan Poso, serta separatisme di Aceh dan Papua. Semua konflik itu adalah konsekuensi dari model nasionalisme kesatuan yang dipaksakan berlaku dalam masyarakat Indonesia yang beragam.

Untuk mengompensasikan hal ini, negara mengurangi kekuasaannya. Terjadi desentralisasi kekuasaan. Daerah-daerah diberikan otonomi. Mereka kini berhak atas sebagian besar pendapatan dari kekayaan yang mereka miliki. Berkurangnya kekuasaan negara ini beriringan dengan semakin membesarnya gelombang globalisasi. Agennya adalah teknologi dan pengendalinya adalah kapitalisme. Pada puncaknya, negara mengalami delegitimasi besar-besaran dalam kendali atas diskursus nasionalisme. Nasionalisme berorientasi kesatuan yang disponsori oleh negara, tak lebih dari mitos. Kini masyarakat sipil mulai mengembangkan diskursusnya sendiri tentang nasionalisme. Mereka lah kini yang memegang simpul legitimasi.

Karya Bertrand bisa menjadi pintu masuk yang akan menghantarkan penelitian ini lebih fokus. Ranah-ranah ketegangan nasionalis; agama, etnik, kelas, dan sumber daya bisa menjadi pegangan awal untuk menyusun simpul-simpul ideologis yang melatarbelakangi diskursus nasionalisme di Indonesia. Namun, karya Bertrand seolah menjustifikasi bahwa simpul-simpul ketegangan itu selalu berujung pada konflik dan, akhirnya, disintegrasi. Padahal, boleh jadi, dalam ranah masyarakat sipil Indonesia yang lebih luas dan beragam simpul-simpul itu menjadi dasar bagi adanya sebuah kompromi baru tentang sosok Indonesia sebagai sebuah bangsa. Artinya, nasionalisme Indonesia bisa jadi tidak berupaya mengatasi simpul-simpul ketegangan itu, namun merawatnya dan berupaya

menemukan alternatif-alternatif baru darinya. Penelitian ini akan berupaya menelusurinya.

Selain buku-buku hasil penelitian di atas, yang menjadi acuan bagi peneliti dalam penelitian kali ini juga penelitian-penelitian seputar diskursus nasionalisme di masyarakat sipil di Indonesia. Antara lain penelitian yang dilakukan Irsyad Zamzami, yang meneliti tentang diskursus nasionalisme di kalangan organisasi masyarakat sipil di era pasca otoritarian. Irsyad menemukan bahwa ternyata nasionalisme tidak selalu merupakan proyek identitas. Nasionalisme juga merupakan strategi perlawanan terhadap kapitalisme global dan oligarkisme Negara. Dan hingga saat ini, diskursus tentang nasionalisme masih belum selesai.<sup>3</sup>

Dalam penelitian lainnya yang dilakukan oleh Rina Hermawati, meneliti tentang Nasionalisme versi aktivis mahasiswa Bandung.<sup>4</sup> Dengan mengambil objek penelitiannya adalah aktivis mahasiswa Universitas Padjajaran Bandung, Rina menyimpulkan bahwa nasionalisme menurut aktivis mahasiswa Bandung terdapat dalam tiga rentang arti, yaitu:

- a. Nasionalisme adalah sebuah ideologi politik yang menjelaskan kepada rakyat tentang batas-batas Negara dan memberikan definisi sebuah bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya.
- b. Nasionalisme sebagai sebuah ikatan emosional yang terbentuk antar anggota suatu bangsa karena adanya kesamaan latar belakang sejarah, wilayah, bahasa, dan nilai.
- c. Nasionalisme sebagai kecintaan terhadap bangsa yang diwujudkan melalui perbuatan yang mencerminkan kepentingan bangsa.

Adapun penelitian-penelitian yang mengkaji secara khusus tentang nasionalisme di kalangan aktivis pemuda di Indonesia masih belum dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini menjadi penting, karena mengawali diskursus nasionalisme dikalangan aktivis pemuda.

---

<sup>3</sup> Irsyad Zamjani, *Organisasi Masyarakat Sipil dan Diskursus Nasionalisme Indonesia Pascaotoritarian: Studi Terhadap Lima NGO dan Ormas di Jakarta*, Tesis, Universitas Indonesia 2008

<sup>4</sup> Rina Hermawati, *Nasionalisme Versi Aktivis Mahasiswa Bandung*, Majalah Ilmiah Unikom, vol.6, hal. 101-110

## B. KERANGKA TEORITIK DAN KONSEPTUAL

Pemuda, sesungguhnya bukan sekedar lapisan sosial dalam masyarakat yang memainkan peran penting dalam perubahan sosial. Tetapi lebih dari itu, “pemuda” merupakan konsep yang merobos definisi pelapisan sosial tersebut, terutama terkait dengan konsep dan nilai-nilai. Sejarawan Taufik Abdullah memandang: “pemuda” atau “generasi muda” adalah konsep-konsep yang sering diberati oleh nilai-nilai. Hal ini terutama disebabkan karena keduanya bukanlah semata-mata istilah ilmiah tetapi lebih sering merupakan pengertian ideologis dan cultural.

### B.1 Pemuda dan Potensi Pemuda

Beberapa konsep tentang peran pemuda yang sering didengungkan adalah sebagai berikut:

1. Pemuda harapan bangsa, di atas pundak pemudalah tergantung banyak harapan.
2. Pewaris masa depan, secara kuantitatif dan kualitatif, potensi pemuda akan menjadi energi yang penting dalam mengemban tanggung jawab masa depan.
3. Regenerasi Kepemimpinan, pemuda akan menjadi mata rantai yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan.

Ben Anderson (1972) membedakan kehidupan pemuda Jawa dalam empat fase, yaitu: masa kanak-kanak, muda, dewasa, dan usia lanjut. Masa kanak-kanak dimulai sejak seorang anak lahir dan berakhir ketika dia berusia sekitar enam tahun. Setelah itu, mereka masih harus menjalani ritual sunatan (khitan) dan setelah itu dia dianggap muda, dan harus terlepas dari orang tua (keluarga). Untuk selanjutnya mereka harus diharuskan untuk menempa diri dengan mencari ilmu dan pengalaman hidup.

Sementara itu, meski bukan merupakan bagian dalam penelitiannya, Clifford Geertz, sempat mencatat peran penting kaum muda di tengah perubahan sosial yang terjadi di Indonesia. Dalam bukunya yang terkenal, *The Religion of Java* (1981), Geertz menyatakan bahwa diantara kelompok-kelompok yang paling penting dalam perubahan sosial di Jawa adalah kelompok pemuda.<sup>5</sup> Perluasan pendidikan gaya barat yang relatif tiba-tiba di Indonesia, menurut Geertz telah

<sup>5</sup> Clifford Geertz, *The Religion of Java*, edisi Indonesia, *Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Masyarakat Jawa*, Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, cetakan kedua, 1983, hal. 498

melahirkan suatu kebudayaan pemuda yang anggota-anggotanya ditandai oleh kegelisahan yang mendalam, suatu ambivalensi yang tajam berhadapan dengan nilai-nilai Jawa tradisional, dan nasionalisme yang intens. Hadirnya kultur pemuda di tengah masyarakat Jawa dilihat Geertz dengan nada optimis sebagai kekuatan yang cenderung menggantikan konflik antar pandangan keagamaan di tengah masyarakat, tetapi justru menggantinya dengan perang antar generasi.

Sedangkan dalam RUU Kepemudaan yang kini dalam proses pengesahan di DPR RI, Pemuda adalah warga Negara Indonesia yang berumur 18 – 35 tahun.<sup>6</sup> Tanggal 28 Oktober 1928, bapak pendiri bangsa (the founding fathers) berikrar "Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa". Komitmen itu merupakan awal pengikat kolektif bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Kini, kebersamaan itu tidak tampak dari reaksi kolektif kita. Rasa kebersamaan sebuah keluarga amat penting sebagai modal sosial yang dapat menyelamatkan keluarga itu saat menghadapi krisis. Tanpa kebersamaan yang tinggi ketika menghadapi krisis, besar kemungkinan keluarga itu terpecah-belah. Francis Fukuyama (2005) menyebut modal sosial sebagai perekat menghadapi beragam benturan dan krisis.<sup>7</sup>

Dalam perjalanan waktu, sebuah bangsa akan menghadapi aneka krisis yang maha berat. Itu sebabnya mengapa dalam sejarah, kita melihat banyak negara yang hilang dan terpecah. Ketika menghadapi krisis, aneka komponen bangsa memilih berpisah dan berdiri sendiri-sendiri sebagai sebuah negara. Terpecah-belahnya Uni Soviet merupakan bukti betapa rasa kebersamaan yang tidak dijaga akan tercerai berai. Kesatuan tidak ada lagi dan masing-masing pihak jalan sendiri-sendiri.

Rendahnya rasa kebersamaan menjadi awal aneka konflik internal komunitas bangsa. Potensi konflik internal akan kian terasa jika bangsa itu majemuk. Itu dilihat dari sisi etnis, agama, bahasa, ataupun geografis. Sejak reformasi, lahir aneka konflik horizontal dari Aceh sampai Papua. Kebebasan akibat gerakan reformasi bukan membuat kita sebagai bangsa saling mencintai, namun saling benci dan membunuh. Jika pendahulu kita dapat melahirkan semangat kebersamaan yang tinggi melalui Sumpah Pemuda, seharusnya di era ini

---

<sup>6</sup> RUU Kepemudaan versi Menegpora RI

<sup>7</sup> Fukuyama, Francis, *State-Building, Governance and World Order in the Twenty-first Century*, Profile Books, London 2005



– dengan generasi jauh lebih terdidik dan hidup di alam modernisasi – kebersamaan itu lebih dapat ditumbuhkan.

Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan tonggak sejarah semangat persatuan bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar untuk melawan kekuatan penjajah. Namun, bila kita melihat kondisi bangsa ini, maka yang ada dalam benak kita adalah kondisi bangsa yang porak-poranda yang tidak tahu arah dan tujuannya. Semua orang hanya menuruti kemauannya sendiri dan tidak ada kerja sama saling menguntungkan. Boleh dibilang, sekarang kita sedang mengalami *culture shock* dan *sosial shock* yang sangat memprihatinkan di mana kebebasan yang dihembuskan pemerintah telah menimbulkan euphoria kebebasan di masyarakat sendiri. Indonesia digerogeti dari dalam dan dari luar.

Apabila dilihat dari komposisi demografi penduduk di Indonesia, maka sesungguhnya jumlah pemuda di Indonesia sangat potensial yaitu sebesar 37,2% dari jumlah penduduk di Indonesia. Dengan komposisi pemuda yang berada di pedesaan sebesar 35,2% dan di perkotaan sebesar 40%.<sup>8</sup> Hal ini memberikan indikasi bahwa dengan jumlahnya, pemuda dapat memberikan peran signifikan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan baik yang ada di pusat ataupun di daerah-daerah.

Pemuda menjadi menjadi penting karena didalamnya juga terdapat pengaruh dari generasi sebelumnya yang bisa jadi ikut mempengaruhi cara pandang dirinya terhadap rasa nasionalisme dan Ke-Indonesia-an itu sendiri. Selain itu, keberadaan pemuda yang berhimpun dalam OKP tentunya memiliki metodologi yang sistematis dalam menerapkan nilai-nilai nasionalisme dalam aktivitasnya. Atau mungkin sebaliknya, mereka justru meragukan nilai-nilai nasionalisme dan kerangka Indonesia itu sendiri, dan malah memiliki konsep nasionalisme tersendiri menurut cara pandang mereka.

## **B.2 Nasionalisme dan Negara Bangsa**

Salah satu definisi konseptual dari nasionalisme yang terkenal diungkapkan oleh Ernest Gellner (1983). Ia mengatakan nasionalisme adalah doktrin bahwa unit politik (*the state*) dan unit budaya (*the nation*) harus berpadu. Nasionalisme

---

<sup>8</sup> Susenas BPS 2003

berarti bahwa negara, yang merupakan organisasi pelaksana kekuasaan yang berdaulat atas suatu wilayah, harus memerintah atas nama dan demi kepentingan suatu bangsa tertentu yang didefinisikan sebagai sekelompok orang yang merasa memiliki kebudayaan yang sama. Nasionalisme dan negara-bangsa, menurut Gellner, adalah sebuah keharusan historis dari masyarakat industri modern.

Masyarakat industri modern memerlukan tenaga terdidik secara lebih luas untuk memberi kemajuan bagi perkembangan teknologi industri. Feodalisme tidak menyediakan tempat untuk itu karena dominasi kelas bangsawan yang minoritas terhadap mayoritas rakyat yang tidak berpendidikan dan tidak mampu tampil sebagai tenaga produktif. Oleh karenanya diperlukan sistem pendidikan yang terkontrol dan merata bagi seluruh rakyat. Kebutuhan akan sistem pendidikan ini memerlukan negara yang kuat dan sentralistik di mana rakyat bebas berkarya tanpa hambatan budaya, agama, atau bahasa.

Oleh karena itu, nasionalisme mengandaikan adanya 'budaya tinggi' dan meninggalkan 'budaya rendah.' Yang disebutnya sebagai budaya tinggi adalah suatu budaya publik melek huruf yang ditanamkan lewat suatu sistem pendidikan massal yang standar dan terkontrol. Sementara budaya rendah adalah budaya tradisional pra modern. Dengan demikian, nasionalisme dapat dipahami sebagai aspirasi untuk mendapatkan dan mempertahankan suatu budaya tinggi dan membuatnya selaras dengan negara. Budaya tinggi ini nantinya akan menjadi budaya bersama yang mempersatukan warganegara dalam sebuah negara-bangsa modern.

Penyeragaman budaya tinggi ini, dengan demikian, mengabaikan kemungkinan adanya suatu masyarakat multikultural dalam sebuah Negara-bangsa. Menurut Gellner, budaya tinggi ini akan disebarkan oleh mereka yang ia sebut sebagai 'spesialis budaya' (*cultural specialist*). Yang disebut sebagai spesialis budaya ini adalah kaum intelegensia. Mereka lah yang menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bagi negara-bangsa tersebut.<sup>9</sup> Jack Snyder juga menjelaskan mengapa nasionalisme membuat kekuasaan negara sangat efektif. Sebelum paruh kedua abad ke-18, dinasti dan imperium berhasil memerintah rakyat yang pasif dan menikmati cukup banyak surplus ekonomi mereka untuk

---

<sup>9</sup> Snyder, Jack. *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah: Demokratisasi dan Konflik Nasionalis* (terj. Martin Aleida dan Parakitri Simbolon). Jakarta: KPG. 2003. hal. 40-41

mengongkosi tentara bayaran atau bangsawan bersenjata.<sup>10</sup> Penguasa jarang mengaku bahwa mereka memerintah demi kemakmuran rakyat. Tidaklah menjadi soal pada masa itu bahwa rakyat sering berbicara dengan bahasa yang berbeda dan bahwa mereka tidak memiliki identitas nasional yang sama.

Tapi, keadaan itu kemudian berubah seiring munculnya kapitalisme niaga, tentara rakyat, dan percetakan murah. Ketika kekayaan yang berasal dari perdagangan dan kemudian dari industri makin menyebar dalam masyarakat, negara-negara yang paling berhasil adalah yang bisa meyakinkan masyarakat dagang mereka untuk membayar pajak atau mau meminjamkan kekayaan mereka kepada negara. Ini memungkinkan negara untuk terjun dalam peperangan besar dan menggalakkan perdagangan. Negara yang mampu merebut hati rakyatnya menjadi unggul di bidang angkatan darat dan laut. Untuk pertama kali, nasionalisme, doktrin yang menyatakan bahwa kepentingan negara dan rakyat adalah satu menjadi laku di bursa gagasan. Berkembangnya penerbitan komersial yang murah selama kurun waktu itu menyediakan sarana yang jitu untuk menawarkan doktrin itu kepada masyarakat. Negara yang menikmati loyalitas aktif rakyatnya, seperti Britania pada pertengahan abad ke-18 dan Perancis setelah Revolusi 1789, menjadi pusat kekuasaan yang mengancam semua negara yang ketinggalan dalam menggalang pendukung berhaluan nasionalis.

Menurut Snyder, kebutuhan negara akan dukungan rakyat menimbulkan dua tantangan yang saling berlawanan bagi para pemimpin; bagaimana meningkatkan kesetiaan rakyat sekaligus mengekang tuntutan mereka. Untuk mengatasi hal itu, kaum elite memerlukan dua perangkat; lembaga yang efektif (yang mencerminkan kebiasaan bekerjasama untuk tujuan bersama), dan gagasan-gagasan pemersatu (yang meyakinkan rakyat bahwa mereka senasib sepenanggungan). Di dalam kelompok besar dan rumit seperti bangsa, dibutuhkan lembaga-lembaga resmi yang terspesialisasi untuk melaksanakan beragam tugas yang memungkinkan munculnya tindakan kolektif: lembaga legislatif menyusun norma-norma kolektif; eksekutif menentukan kebijakan yang jadi titik temu upaya kolektif, imigrasi memastikan keanggotaan kelompok, birokrasi memantau sumbangan terhadap tugas-tugas kelompok dan menyediakan informasi serta standarisasi, yudikatif

---

<sup>10</sup> *ibid*

menjamin perjanjian antar-warga, dan kepolisian menjamin kepatuhan terhadap norma-norma.<sup>11</sup>

Selain pengembangan lembaga-lembaga nasional, menurut Snyder, penting pula indoktrinasi gagasan-gagasan pemersatu. Gagasan, pemikiran, juga memainkan peranan utama dalam melahirkan tindakan kolektif dengan menghasilkan kelompok sedemikian rupa sehingga rakyat rela menggabungkan diri, lengkap dengan perkiraan laba-rugi tindakan kolektif mereka, dan rasa kewajiban moral mereka. Gagasan itu berguna untuk memandu mereka mendefinisikan siapa kita dan siapa mereka. Semua elite nasionalis berkepentingan untuk memprovokasi segala gagasan yang membesar-besarkan ancaman dari bangsa atau golongan lain, dan sekaligus melebih-lebihkan keuntungan jika bersatu menghadapi ancaman itu. Jika bisa dibuat meyakinkan, gagasan semacam itu akan memudahkan timbulnya tindakan kolektif di kalangan anggota kelompok.<sup>12</sup>

Dari definisi di atas dapat ditelaah bahwa nasionalisme mempersyaratkan kehadiran negara sebagai kekuatan pemersatu dalam rangka membentuk sebuah program nasional yang sama. Dalam pengertian ini, negara berwenang mengorganisir warga-bangsa untuk bersatu melakukan apa yang ia definisikan bermanfaat dan menghindari apa yang ia anggap merusak bagi pembangunan bangsa. Maka, nasionalisme hadir sebagai doktrin yang mengikat pendukungnya untuk loyal kepada bangsa yang kini dikendalikan oleh negara.

### **B.3 Kebangkitan Nasionalisme dan Krisis Negara Bangsa**

Proyek nasionalisme sebagai proyek negara-bangsa mendapatkan tentangan dari sejumlah teoritis sosial. Perkembangan globalisasi membuat batas-batas teritorial semakin kurang relevan. Hal ini menandai krisis negara-bangsa. Sebaliknya, era globalisasi adalah pula era kebangkitan kaum nasionalis, yang diekspresikan baik dalam bentuk perlawanan terhadap negara-bangsa yang mapan maupun dalam bentuk rekonstruksi identitas atas basis kebangsaan (*nationality*) yang diperlawanan dengan identitas 'asing.' Pendapat ini dikemukakan oleh Manuel Castells (1997), menurutnya bangsa dan nasionalisme memiliki kehidupannya sendiri, independen dari aspek-aspek kenegaraan (*statehood*).

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 42

<sup>12</sup> *Ibid*, hal. 45

Menjadi bangsa mempersyaratkan aspek-aspek yang lebih kompleks, lebih daripada sekadar konstruksi budaya atau proyek politik. Etnisitas, agama, bahasa, atau teritori saja tidak cukup untuk membangun bangsa dan menopang nasionalisme. Bangsa dan nasionalisme membutuhkan apa yang disebut pengalaman bersama.<sup>13</sup>

Castells memberi contoh dua bangsa yang kontradiktif namun memiliki semangat nasionalisme yang sama; Jepang dan Amerika Serikat. Menurutnya, keduanya adalah negara dengan identitas nasional yang kuat dan mayoritas warga bangsanya memiliki rasa patriotisme yang kuat. Yang menarik, Jepang adalah salah satu bangsa yang secara etnis paling homogen di dunia, sementara Amerika Serikat adalah salah satu bangsa dengan etnis paling beragam di dunia. Namun, dalam kasus keduanya, terdapat sejarah dan proyek bersama, dan narasi sejarah mereka dibangun di atas suatu pengalaman yang secara sosial, etnis, teritorial, dan gender beragam, namun berlaku sama bagi warga dari setiap negara. Sementara itu, bangsa-bangsa dan nasionalisme yang lain tidak sampai menghasilkan Negara-bangsa modern (misalnya Scotlandia, Catalonia, Quebec, Kurdistan, Palestina), namun selama berabad-abad mereka menampilkan suatu identitas kultural/teritorial yang kuat dan mengekspresikan dirinya sebagai suatu karakter nasional.<sup>14</sup>

Selain itu, Castells juga menanggapi analisis yang menyebutkan bahwa nasionalisme adalah fenomena yang melulu melibatkan kaum elite demi kepentingan ekonomi politik mereka. Menurut, Castells, nasionalisme modern justru seringkali merupakan reaksi perlawanan terhadap dominasi elite global dan, dalam batas tertentu, lokal. Globalisasi dan neoliberalisme yang melahirkan institusi-institusi hegemonik seringkali mendapatkan perlawanan dari kaum aktivis gerakan sosial dan aktivis nasionalis di berbagai negara. Oleh karena nasionalisme kontemporer lebih bersifat reaktif daripada proaktif, ia cenderung lebih bersifat kultural daripada politis, dan lebih berorientasi kepada pembelaan terhadap suatu budaya yang telah terlembagakan daripada kepada pembentukan

---

<sup>13</sup> Castells, Manuel, *The Power of Identity*, Oxford: Blackwell Publishing, 1997. hal 29

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 29-30

atau pembelaan terhadap sebuah negara. Maka, nasionalisme dikonstruksi oleh aksi dan reaksi sosial, baik oleh elite maupun massa.<sup>15</sup>

Mengacu kepada Rubert de Ventos, Castells mengungkapkan bahwa identitas nasional dibentuk melalui interaksi historis dari empat rangkaian faktor, yakni faktor primer, seperti etnisitas, teritori, bahasa, agama, dan sejenisnya; factor generatif, seperti perkembangan komunikasi dan teknologi, pembentukan kota-kota, munculnya tentara modern dan monarki sentralistik; *induced factor*, seperti kodifikasi bahasa dalam tata bahasa resmi, pertumbuhan birokrasi, dan pembangunan sistem pendidikan nasional; dan faktor reaktif, yakni pembelaan terhadap identitas yang tertindas dan kepentingan yang dibatasi oleh suatu kelompok sosial atau aparatus institusional dominan, yang memicu pencarian identitas alternatif dalam memori kolektif masyarakat. Faktor mana memainkan peran apa dalam formasi setiap nasionalisme, dan setiap bangsa, bergantung pada konteks historis, pada materi yang dimiliki oleh memori kolektif, dan pada interaksi antara strategi kekuasaan yang bertentangan satu sama lain. Maka, nasionalisme memang dikonstruksi secara kultural dan politik, namun soal sesungguhnya, baik teoritik maupun praktik dan sebagaimana bagi semua identitas, adalah bagaimana, dari mana, oleh siapa, dan untuk apa ia dikonstruksi.<sup>16</sup>

#### **B.4 Tipologi Nasionalisme**

Telaah di muka mengemukakan tegangan teoritik antara dua ragam nasionalisme. Nasionalisme yang pertama berorientasi pada pemaparan suatu lembaga politik yang mengikat bangsa, yaitu negara, sementara nasionalisme yang lain lebih bersifat kultural. Chaim Gans menyebutnya sebagai tegangan antara nasionalisme statis dan nasionalisme kultural. Agar negara bisa merealisasikan nilai-nilai politik seperti demokrasi, kesejahteraan ekonomi, dan keadilan distribusi, menurut Gans<sup>17</sup>, warganegara dari sebuah negara harus memiliki suatu budaya nasional yang homogen. Gans secara tegas menyebut Gellner sebagai penganut konsep nasionalisme statis.<sup>18</sup> Sementara menurut nasionalisme kultural,

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal 31

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 33

<sup>17</sup> Gans, Chaim. *The Limits of Nationalism*, New York: Cambridge University Press, 2003. hal 7

<sup>18</sup> *Ibid*, hal 23

anggota dari berbagai kelompok yang berbagi sejarah dan budaya yang sama memiliki suatu kepentingan mendasar untuk melekatkannya dengan budaya mereka dan menjaganya sepanjang generasi. Karena kepentingan inilah, Negara penting untuk dipertahankan. Menurut Gans, perbedaan dari nasionalisme statis dan nasionalisme kultural ada pada posisi masing-masing terhadap negara dan budaya. Dalam nasionalisme statis, budaya nasional adalah alat, sementara Negara adalah tujuan. Sebaliknya, dalam nasionalisme kultural, budaya nasional adalah tujuan sedangkan negara hanyalah alat.

Gans menyatakan bahwa kedua tipologi nasionalisme tersebut adalah catatan terhadap tipologi yang dibuat oleh sejarawan Hans Kohn (1955) menyangkut dualisme nasionalisme teritorial-kewargaan (*territorial-civic nationalism*) dan nasionalisme etnokultural (*ethnocultural nationalism*). Yang pertama, menurut Kohn, adalah karakter nasionalisme dari negara-negara maju di Eropa Barat, Inggris, Amerika Serikat, dan Perancis, sedangkan yang kedua adalah karakter nasionalisme dari negara-negara terbelakang di Eropa Timur, Eropa Tengah, dan sejumlah negeri-negeri pascakolonial. Nasionalisme kewargaan adalah “suatu gerakan politik untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan melindungi hak-hak sipil.” Sedangkan nasionalisme kultural adalah “mimpi dan harapan para ilmuwan dan pujangga, suatu mimpi yang didasarkan pada warisan masa lalu dan tradisi kuno.” Nasionalisme kewargaan dianggap berkarakter “melihat ke depan” (*forward looking*), sedangkan nasionalisme etnokultural berciri “melihat ke belakang” (*backward looking*). Lebih jauh, Kohn menyatakan bahwa nasionalisme etnokultural dari negeri-negeri Timur adalah reaksi elite mereka terhadap nasionalisme kewargaan dari negeri-negeri maju di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Kohn menyebut nasionalisme kewargaan sebagai progresif dan nasionalisme etnokultural sebagai regresif. Sejumlah sarjana lain menyebut yang pertama sebagai nasionalisme liberal, sementara yang terakhir non-liberal.<sup>19</sup> James Kellas (1998), melandaskan pada dikotomi Kohn, membedakan antara nasionalisme “Barat” yang bersifat sosial dan inklusif sebagai lebih demokratik dan liberal dan nasionalisme Eropa Timur yang bersifat

---

<sup>19</sup> Kohn, Hans. *Nationalism: Its Meaning and History*, Princeton: D. Van Nostrand Company, 1955. hal 29-30; Gans, Chaim. *Op.Cit*, hal 7-8; Brown, David. *Contemporary Nationalism: Civic, Ethnocultural, and Multicultural Politics*. London dan NewYork: Routledge, 2000. hal 51

eksklusif, intoleran dan seringkali membawa kepada otoritarianisme (73-4). Gans dan juga Brown memberi catatan atas pandangan Kohn tersebut. Menurut Gans, dikotomi nasionalisme yang dibuat Kohn tidak bisa bersifat mutlak. Dalam banyak kasus, negara seringkali berupaya memaksa individu dan kelompok untuk berasimilasi ke dalam arus mayoritas. Ia memberi contoh Perancis di akhir abad XIX dan awal abad XX. Individu-individu warganegara tidak ditanya apakah mereka menerima budaya Perancis. Selain itu serangkaian diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang disebut imigran terus berlangsung. Begitu pula Amerika Serikat dan Australia yang berupaya meminggirkan warga asli Indian dan Aborigin dan memaksa mereka berasimilasi dengan dengan cara-cara represif. Hal-hal tersebut juga terjadi di negara-negara pascakolonial di Asia dan Afrika.<sup>20</sup> Brown juga menyoroti hal yang sama. Menurutnya, nasionalisme kewargaan seringkali mengambil suatu bentuk otoritarian, seperti yang diartikulasikan oleh Suharto di Indonesia, atau sebelumnya oleh nasionalisme Jacobin di Perancis. Sebaliknya nasionalisme etnokultural seringkali juga mempromosikan penghormatan atas hak minoritas dan keadilan sosial.<sup>21</sup> Lebih jauh, Gans juga menambahkan bahwa nasionalisme tidak bisa dikaitkan begitu saja dengan ideologi-ideologi seperti liberalisme atau sosialisme. Nasionalisme memiliki konteks politiknya sendiri.<sup>22</sup> Mengutip Benedict Anderson, “*tidak seperti isme-isme lain, nasionalisme tidak pernah menghasilkan pemikir besarnya sendiri: ia tidak memiliki pemikir sekelas Hobbes, Tocqueville, Marx, atau Weber*”.<sup>23</sup>

Gans menyatakan bahwa distingsi normatif yang dibuat oleh Kohn – dan kemudian dilestarikan oleh para ahli – tentang nasionalisme kewargaan dan nasionalisme etnokultural sangat sulit dimanifestasikan pada ranah praktis. Dikotomi tersebut bersifat sangat tidak netral. Gans mengusulkan apa yang di muka telah disebut sebagai nasionalisme statis dan nasionalisme kultural. *Pertama*, posisi di mana suatu budaya nasional bersama adalah suatu syarat atau alat bagi perwujudan nilai-nilai politik yang tidak diambil dari budaya-budaya

---

<sup>20</sup> Gans, Chaim. *Op.Cit*, hal 13

<sup>21</sup> Brown, David. *Contemporary Nationalism: Civic, Ethnocultural, and Multicultural Politics*. London dan New York: Routledge, 2000. hal 54-55

<sup>22</sup> Gans, Chaim. *Op.Cit*, hal 14

<sup>23</sup> Andersson, Benedict R. O. G., *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*, London: Verso 1983. hal 5;



nasional maupun dimaksudkan bagi perlindungannya, lebih tepat disebut nasionalisme statis daripada nasionalisme kewargaan. Hal ini akan bisa menghapus konotasi positif dari istilah nasionalisme kewargaan dan memungkinkan orang menangkap fakta bahwa proses homogenisasi nasional terhadap warga negarabangsa tidak selalu dijustifikasi oleh nilai-nilai liberal, namun seringkali dilakukan dengan cara-cara yang jauh dari beradab (*civil*).<sup>24</sup>

*Kedua*, penyebutan kultural lebih tepat daripada etnik meskipun terdapat fakta bahwa dalam sebagian besar kasus, baik dalam manifestasi historis maupun versi filosofisnya, terdapat elemen-elemen yang bertalian dengan etnisitas. Istilah “kultural” akan mampu menghilangkan konotasi negatif dari nasionalisme etnis. Nasionalisme kultural disebut demikian karena justifikasi terhadapnya terutama didasarkan pada penyoyal budaya dan sejarah dari suatu kelompok.<sup>25</sup> Di sini lagi-lagi budaya tidak bisa dimaknai sebagai sebuah institusi yang mapan seperti definisi klasik kaum fungsionalis, namun sebagai sebuah proses bereksistensi yang melibatkan kontestasi dan kekuasaan. *Ketiga*, distingsi antara nasionalisme statis dan nasionalisme kultural tidak bersifat kronologis-historis seperti halnya nasionalisme kewargaan yang merupakan fase lanjut dari nasionalisme etnokultural, namun bersifat sosiologis sebagai dua buah prinsip yang berbeda.

Menurut Gans, nasionalisme dengan demikian pada dasarnya ditentukan oleh posisinya terhadap negara. Nasionalisme kultural menekankan pada pelayanan yang bisa dan harus diberikan negara kepada bangsa, sedangkan nasionalisme statis menekankan pada pelayanan yang semestinya diberikan oleh suatu budaya nasional bersama untuk Negara.<sup>26</sup> Nasionalisme statis selalu berorientasi kepada pembentukan dan pemapanan negara (*state-seeking*). Sedangkan nasionalisme kultural bisa berwajah *state-seeking* maupun *non-stateseeking*. Bagi yang pertama, negara-bangsa adalah alat untuk melindungi budaya kelompok sehingga suatu kelompok budaya semestinya memiliki negaranya sendiri. Sedangkan bagi yang kedua, negara tetap diinginkan namun tidak menjadi sesuatu kebutuhan utama. Oleh karenanya, nasionalisme kultural bukan semata proyek budaya, namun juga proyek politik.

---

<sup>24</sup> Gans, Chaim. *Op. Cit*, hal 15

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> *Ibid*, hal 25

### B.5 Nasionalisme Sebagai Wacana

Craig Calhoun (2007) mengatakan bahwa sebagai sebuah wacana, nasionalisme seringkali dianggap tema remeh. Nasionalisme seringkali hanya dihubungkan dengan meletusnya kekerasan, praktik diskriminasi etnis atau rasial, dan gerakan sosial yang bersifat massal. Para analis kerap kali gagal melihat nasionalisme keseharian (*everyday nationalism*) yang mengelola rasa memiliki seseorang akan dunia dan negara-negara tertentu. Adalah penting untuk mengkaji nasionalisme tidak hanya dengan memilih bentuk-bentuknya yang paling ekstrem atau problematik sebagai bahan perhatian.

Sebaliknya, nasionalisme adalah sebuah formasi diskursif yang memberi bentuk kepada dunia modern. Ia adalah cara berbicara, menulis, dan berpikir tentang unit-unit dasar dari budaya, politik, dan kepemilikan yang menjadikan bangsa sebagai dimensi yang nyata dan kuat dari kehidupan sosial. Bagi Calhoun, bangsa-bangsa tidak ada “secara obyektif” sebelum mereka ada secara diskursif. Demikian pula bangsa yang diciptakan dari percakapan dan sentimen adalah juga struktur material “hakiki” dari solidaritas dan rekognisi. Mengatakan bahwa nasionalisme adalah bagian dari suatu imajinasi sosial tidak berarti mengatakan bahwa bangsa hanyalah bayang imajinasi yang harus dianalisis secara mendalam. Sebagai formasi diskursif, nasionalisme menggerakkan diskusi yang lebih kaya karena ia memunculkan banyak persoalan dan masalah sebagaimana ia menghadirkan jawabannya.

Nasionalisme menyebar dalam dunia modern karena ia digunakan secara luas bukan hanya karena ia ditemukan. Namun, ia digunakan dalam berbagai proyek yang berbeda-beda, seperti klaim atau pemersoalan atas legitimasi pemerintah, tuntutan reorganisasi kurikulum pendidikan, promosi pelenyapan etnis minoritas dengan tujuan pemurnian ras atau budaya. Maknanya bersandar dalam kesalinghubungan antara berbagai pemakaian yang beragam ini, bukan dalam satu pun di antaranya. Tidak ada titik temu bersama yang secara pasti mendefinisikan susunan tentang nasionalisme “sejati” atau bangsa “sejati”. Tapi, nasionalisme adalah nyata dan kuat. Nasionalisme menjadi masalah karena ia merupakan suatu bagian vital dari proyek kolektif yang memberi bentuk kepada

dunia modern, mengubah unit-unit solidaritas sosial, identitas, dan pengakuan hukum di dalamnya, serta menggerakkan konflik-konflik berdarah.<sup>27</sup>

Makna paling dasar dari nasionalisme adalah bagaimana orang mengkategorisasikan populasi manusia, baik sebagai suatu cara melihat dunia sebagai satu keseluruhan maupun sebagai suatu cara membangun identitas kelompok dari dalam. Selain itu nasionalisme biasanya merujuk bukan hanya pada penggunaan kategori bangsa untuk mengkonseptualisasikan kelompok-kelompok sosial, namun juga mengikat identitas dan kelompok nasional. Nasionalisme dengan demikian adalah cara mengonstruksi kelompok dan klaim normatif. Nasionalisme dengan begitu adalah penggunaan kategori “bangsa” untuk mengorganisir persepsi tentang identitas dasar manusia, mengelompokkan orang secara bersamaan dengan warga sebangsa dan membedakan mereka dari anggota bangsa lain. Ia bekerja sebagai suatu cara mereproduksi solidaritas di dalam kategori-kategori nasional, sebagai suatu jalan menetapkan bagaimana kelompok-kelompok tertentu harus diperlakukan, dan sebagai suatu cara memandang dunia secara keseluruhan.

Calhoun juga menyatakan bahwa yang paling sentral dari diskursus nasionalisme adalah ide bahwa harus ada keserasian antara suatu bangsa dan sebuah Negara berdaulat; bangsa menjadi landasan dari legitimasi negara. Di sini, seperti halnya Castells, Calhoun tidak setuju pada Gellner. Nasionalisme bukan sekadar “prinsip politik.” Mengacu kepada Michael Billig (1994) dan Ben Anderson (1983), reproduksi terhadap nasionalisme adalah masalah praktik yang bersifat banal (kompetisi olahraga dalam olimpiade, misalnya), konstruksi imajinatif (museum, sensus, kebiasaan membaca, misalnya) dan juga ideologi politik. Tidak ada definisi tentang bangsa (atau istilah yang berhubungan seperti nasionalisme atau nasionalitas) yang pernah meraih penerimaan umum. Inilah pentingnya pendapat bahwa nasionalisme lebih baik dipahami sebagai suatu “formasi diskursif.” Ia adalah suatu cara berbicara yang membentuk kesadaran kita, tapi juga cukup problematik ketika ia tetap membangkitkan banyak isu dan persoalan. Sebagai suatu formasi diskursif, nasionalisme diimplikasikan dalam

---

<sup>27</sup> Calhoun, Craig. *Nations Matter: Culture, History, and the Cosmopolitan Dream*. London and New York: Routledge, 2007. hal 28-29

meluasnya anggapan tentang masyarakat sebagai keseluruhan yang terikat dan integral dengan identitas, budaya, dan institusi yang bersifat khas.<sup>28</sup>

Gagasan tentang bangsa dalam politik modern pada dasarnya dikontestasikan karena definisi apapun akan melegitimasi sejumlah klaim dan mendelegitimasi klaim lainnya. Ia juga merefleksikan berbagai persoalan yang lebih umum dengan berbagai definisi kaum esensialis. Bangsa dan nasionalisme adalah di antara istilah yang digunakan bukan untuk merujuk sebuah susunan yang bisa didefinisikan secara jelas. Semua definisi esensialis bersifat tidak stabil dan secara inheren bisa diperdebatkan, bukan hanya karena definisi itu digunakan secara bias untuk atau melawan berbagai klaim politik, namun karena ia didasarkan pada (i) kualitas di mana bangsa atau gerakan kaum nasionalis berbagi dengan sesuatu yang bersifat non-bangsa (semisal etnisitas), atau (ii) pada kualitas-kualitas yang tidak dibagi secara jelas di antara semua anggota yang diakui dari bangsa (seperti kontrol atas atau ambisi mengontrol sebuah negara).<sup>29</sup>

Kajian-kajian tentang nasionalisme telah dilakukan melalui berbagai ragam perspektif. David Brown (2000) dengan baik mengungkapkan berbagai langgam perspektif dari bagaimana subyek nasionalisme dikaji. Ia menyebutnya bahasa-bahasa konseptual dari nasionalisme.” Menurut Brown, studi-studi tentang nasionalisme selama ini dilakukan dalam kerangka tiga pendekatan; primordialis, situasionalis, dan konstruktivis. Pendekatan primordialis menggambarkan bangsa berdasarkan pada komunitas natural dan organik yang mendefinisikan identitas anggota-anggotanya, yang merasakan adanya suatu ikatan emosional yang kuat dan abadi dengannya. Pendekatan primordialis bertendensi menelusuri muasal orisinal suatu bangsa. Pendekatan ini menekankan pada aspek instinktif.<sup>30</sup> Yang kedua adalah pendekatan situasionalis. Ia menjelaskan identitas etnis dan nasional bukan sebagai ikatan instinktif alami dengan komunitas organik, namun sebagai sumber yang didayagunakan oleh kelompok-kelompok individu demi pencapaian kepentingan bersama mereka.<sup>31</sup> Dalam telaah nasionalisme kontemporer, pendekatan ini terutama menekankan pada respons terhadap situasi-situasi yang

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 54

<sup>29</sup> *Ibid*, hal 55

<sup>30</sup> Brown, *op.cit.* hal 6

<sup>31</sup> *Ibid*, hal 13

berpengaruh terhadap kepentingan-kepentingan kelompok. Studi tentang pengaruh globalisasi terhadap nasionalisme atau intervensi negara terhadap kepentingan kelompok minoritas mengacu kepada pendekatan situasionalis ini. Sementara pendekatan yang ketiga disebut konstruktivis. Pendekatan ini menekankan bahwa identitas nasional dikonstruksi berdasarkan kerangka institusional atau ideologis yang memberikan formula sederhana tentang identitas, selanjutnya melakukan analisis kritis terhadap problem-problem kontemporer, dan akhirnya menyoal kesadaran individu.<sup>32</sup>

Demi menyederhanakan soal, Brown memberi ilustrasi jawaban atas pertanyaan: “mengapa banyak orang memiliki suatu perasaan emosional yang kuat tentang kesadaran dan loyalitas nasional?” Jawaban kaum primordialis adalah bahwa perasaan itu bersifat bawaan, lahir dari fakta bahwa bangsa didasarkan pada kelompok substantif nyata yang merupakan entitas-entitas organik alami yang mendahului adanya interaksi sosial. Kaum situasionalis akan mengatakan bahwa memang terdapat kelompok substantif yang nyata, namun ia dibentuk sebagai hasil dari interaksi sosial dan mereka mendapatkan kekuasaan dari upaya mereka mempertahankan dan meraih kepentingan-kepentingan mereka sendiri. Sementara kaum konstruktivis menjawabnya dengan menyangkal bahwa bangsa adalah entitas-entitas substantif yang nyata. Mereka akan mengatakan bahwa persepsi tentang entitas yang nyata tersebut harus dipahami sebagai sebetulnya kesadaran ideologis yang lebih bersifat menyaring realitas daripada merefleksikannya.<sup>33</sup> Berikut ini diagram yang dibuat Brown:<sup>34</sup>

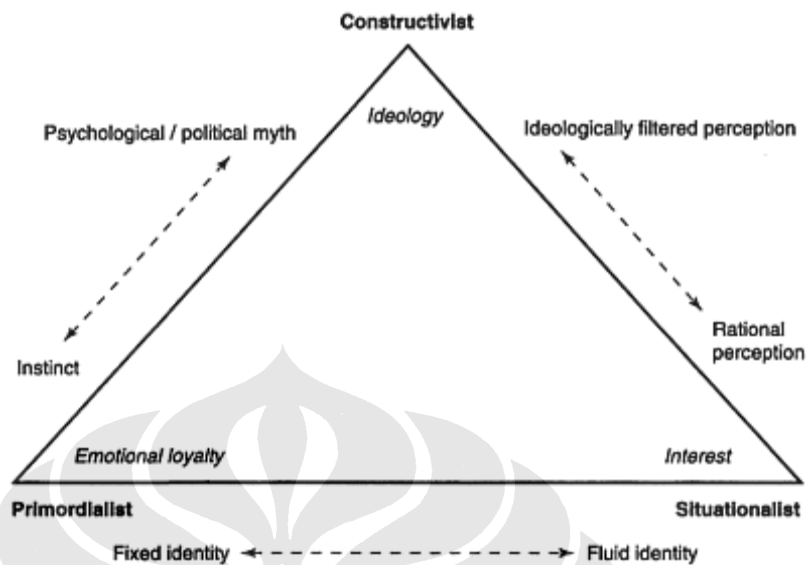
---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal 20

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 20-21

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 5

**Bagan 2.1**  
**Relasi Teori Konstruktivitis, Primordialis, dan Situisionalis**



Studi ini menambahkan aspek lain dari pendekatan terhadap nasionalisme, bukan hanya sebagai sebuah instink primordial, kontestasi kepentingan, atau kesadaran ideologis, namun sebagai sebuah diskursus. Sebagai sebuah studi diskursus, aspek-aspek yang bekerja melalui ketiga pendekatan tersebut akan juga direkam. Senyatanya, ketiga ranah yang digambarkan oleh Brown bisa saling berpautan satu sama lain. Gerakan-gerakan kaum nasionalis seringkali awalnya didasarkan pada sentimen emosional primordial yang hadir dalam situasi di mana kepentingan-kepentingan mereka terancam dan selanjutnya berkembang menjadi suatu kesadaran ideologis melawan “sosok lain” yang dianggap menyimpan sentimen ideologis lain. Pendekatan diskursif akan menelaah sejauh mana ketiga aspek ini menemukan benang merahnya.